

Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pendapatan Pajak Provinsi Jawa Tengah

Rahmad Putra Gautama¹

¹ Program Studi Statistika, Universitas Muhammadiyah Semarang, Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273, Indonesia

*Corresponding author: rahmadgautama15@gmail.com



P-ISSN: 2986-4178
E-ISSN: 2988-4004

Riwayat Artikel

Dikirim: 09 Januari 2024
Direvisi: 25 Maret 2024
Diterima: 26 Maret 2024

ABSTRAK

Dalam rangka mempercepat perkembangan yang sedang berlangsung, Jawa Tengah terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek fisik maupun mental. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari variabel-variabel seperti Pengeluaran Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pendapatan pajak di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan pajak di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa Pengeluaran Per Kapita dan Jumlah Penduduk Miskin memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan pajak, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan dampak negatif. Hasil ini menyarankan bahwa pemerintah daerah perlu memfokuskan perhatian pada variabel-variabel tersebut dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Kata Kunci: Pajak, Faktor-faktor, Regresi Berganda, Asumsi Klasik, Pemodelan

ABSTRACT

In an effort to accelerate the ongoing development, Central Java continues to commit to promoting sustainable development that includes improving the quality of life of the community, both physically and mentally. The data used in this analysis comes from official publications of the Central Java Regional Revenue Management Agency and the Central Statistics Agency. This research aims to examine the impact of variables such as Per Capita Expenditure, Number of Poor

People, Open Unemployment Rate (TPT), and Labor Force Participation Rate (TPAK) on tax revenue in Central Java Province. In addition, this study also seeks to identify the most influential variable on tax revenue in the region. By using the multiple linear regression analysis method, this study successfully revealed that Per Capita Expenditure and the Number of Poor People contribute positively to tax revenue, while the Open Unemployment Rate and Labor Force Participation Rate have a negative impact. These results suggest that the local government needs to focus attention on these variables in an effort to optimize tax revenue, which in turn will support sustainable development and improve the welfare of the community in Central Java.

Keywords: *Tax, Factors, Multiple Regression, Classical Assumptions, Modelling.*

1. Pendahuluan

Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di jantung Pulau Jawa, Indonesia, merupakan wilayah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Jawa Tengah menghadapi tantangan untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, tetapi juga untuk memajukan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial [1]. Pembangunan yang komprehensif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Jawa Tengah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional Indonesia, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh penduduk. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah Jawa Tengah menghadapi kebutuhan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, khususnya dalam hal keuangan daerah [2].

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah dalam mendukung pembangunan. PAD terdiri dari berbagai komponen, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pajak daerah khususnya, menjadi sumber pendapatan yang vital karena secara langsung mencerminkan aktivitas ekonomi dan potensi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Tengah telah mencatatkan peningkatan dalam penerimaan PAD, yang menandakan adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan ini menjadi sebuah kebanggaan dan pencapaian yang perlu dipertahankan serta ditingkatkan, mengingat peran penting PAD dalam mendanai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa tren positif ini berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Hal ini mencakup analisis terhadap variabel-variabel ekonomi seperti Pengeluaran Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Memahami hubungan antara variabel-variabel ini dengan pendapatan pajak akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif. Dengan demikian, analisis yang komprehensif terhadap dinamika pendapatan pajak daerah menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pengetahuan yang ada dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan pajak daerah di Jawa Tengah. Melalui pendekatan analitis yang kuat, penelitian ini akan berkontribusi pada upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah [4].

Penelitian ini memanfaatkan analisis regresi linear berganda untuk mengungkap hubungan kompleks antara berbagai variabel independen dan pendapatan pajak sebagai variabel dependen di Provinsi Jawa Tengah. Sumber data utama berasal dari publikasi resmi Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mempengaruhi pendapatan pajak di wilayah tersebut. Pemilihan analisis regresi linear berganda sebagai metode penelitian didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dinamika antar variabel secara lebih detail dan untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh baik positif maupun negatif terhadap pendapatan pajak, yang memberikan wawasan penting untuk strategi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, TPT, dan TPAK mempengaruhi pendapatan pajak di Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan data dari Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik, studi ini berfokus pada identifikasi faktor utama yang berdampak pada pendapatan pajak, untuk mendukung upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Metodologi Penelitian

2.1. Pajak

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan distribusi pendapatan yang lebih setara. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kunci dalam mengukur kemajuan suatu pembangunan dan efektivitas dari kebijakan ekonomi yang telah diterapkan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, salah satu strategi kunci adalah memberdayakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan, termasuk melalui pengoptimalan pengumpulan pajak dan peningkatan pendapatan dari retribusi daerah. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung inisiatif pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga secara langsung mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. [5].

2.2. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita (PPP) merupakan penyesuaian indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal, dari kedua hal ini pengeluaran perkapita dapat digambarkan dari tingkat daya beli masyarakat dan melihat progres pembangunan manusia di suatu wilayah [6]. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012. Pengeluaran Per Kapita dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP} \quad (1)$$
$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100 \quad (2)$$

Keterangan, Y^{**} : pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, Y^* : pengeluaran per Kapita harga konstan, Y : pengeluaran Per Kapita setahun, IHK : Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012.

2.3. Jumlah Penduduk Miskin

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan pendekatan konsep pemenuhan kebutuhan dasar, yang merujuk pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dalam kerangka ini, kemiskinan diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan non-pangan, bukan sekadar berdasarkan pengeluaran. Orang dianggap sebagai penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan [7]. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu sebagai berikut:

$$HCI = \frac{q}{n} \quad (3)$$

Keterangan, q = Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan n = Jumlah total penduduk

2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja [8]. Rumus yang dapat digunakan untuk tingkat pengangguran terbuka yaitu sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \quad (4)$$

2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. TPAK adalah indikator penting yang mencerminkan dinamika ekonomi suatu daerah dan merupakan faktor kunci dalam mendorong

pembangunan. Partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, seiring dengan peningkatan jumlah individu yang berkontribusi pada produktivitas dan pendapatan daerah. [9]. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tenaga Kerja} = \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja}$$

$$\text{Angkatan Kerja} = \text{Yang Bekerja} + \text{Menganggur}$$

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\% \quad (5)$$

Setelah mengetahui jumlah TPAK, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu menceritakan keadaan yang sesungguhnya terjadi di tempat penelitian. Hasil dari jumlah TPAK tersebut ditentukan tinggi rendahnya melalui tabel kriteria TPAK menurut data BPS yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Frekuensi	Keterangan
64, 13% >	Tinggi
< 64, 13%	Rendah

2.6. Regresi Linier Berganda

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio [10]. Persamaan Model regresi linear berganda dituliskan yaitu sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (6)$$

Keterangan, Y: Variabel terikat atau variabel dependen, X: Variabel bebas atau variabel independent, α : Konstanta, β : Koefisien estimate/ regresi, ε : sisa error. Dalam notasi matriks persamaan (2.1) dapat ditulis menjadi persamaan (2.2) berikut [11]:

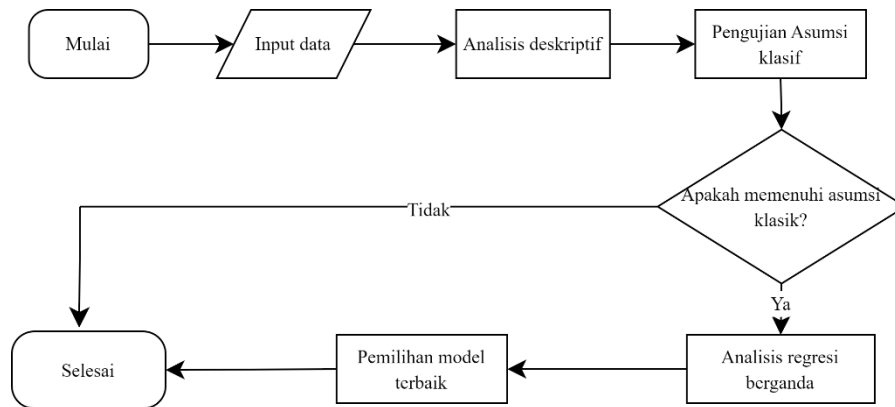
$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (7)$$

Dengan:

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_N \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} 1 & X_{1.1} & X_{1.2} & \dots & X_{1.p-1} \\ 1 & X_{2.1} & X_{2.2} & \dots & X_{2.p-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{n.2} & X_{n.2} & \dots & X_{N.p-1} \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{p-1} \end{bmatrix} \text{ dan } \varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} \quad (8)$$

Keterangan, Y: Vector variabel tidak bebas berukuran $n \times 1$, X: Matriks variabel bebas berukuran $n \times p$, β : Vektor parameter berukuran $p \times 1$, ε : Vektor error berukuran $n \times 1$.

Langkah-langkah analisis ini juga selanjutnya dapat diketahui berdasarkan pada diagram alir pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur penelitian

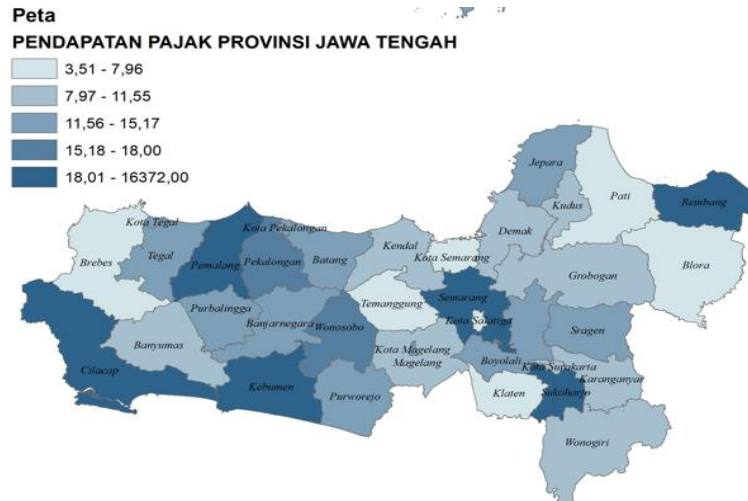
3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan peta distribusi pendapatan pajak di Jawa Tengah yang dibagi menjadi lima kelompok interval, dapat dilihat pola distribusi yang menarik secara geografis. Kelompok interval dengan pendapatan pajak tertinggi cenderung terkonsentrasi di beberapa kabupaten/kota strategis, yang menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas ekonomi, populasi, dan pendapatan pajak. Kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok pendapatan pajak tertinggi, misalnya, terletak di sekitar ibu kota provinsi dan wilayah-wilayah dengan pusat ekonomi dan industri yang berkembang. Ini mencakup area-area seperti Semarang, Surakarta (Solo), dan sekitarnya, yang dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan jasa. Wilayah-wilayah ini menunjukkan intensitas warna yang lebih gelap pada peta, mengindikasikan tingkat pendapatan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Tengah.

Di sisi lain, kelompok interval dengan pendapatan pajak yang lebih rendah cenderung terdapat di wilayah-wilayah perbatasan provinsi dan daerah-daerah pedesaan yang lebih jauh dari pusat-pusat ekonomi utama. Wilayah-wilayah seperti kabupaten di bagian timur dan barat provinsi, yang lebih jauh dari Semarang dan Surakarta, menunjukkan intensitas warna yang lebih terang, mencerminkan pendapatan pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pusat-pusat ekonomi utama di Jawa Tengah. Pola distribusi ini memberikan wawasan penting tentang disparitas ekonomi dan sosial di Jawa Tengah. Wilayah-wilayah dengan pendapatan pajak tinggi menunjukkan potensi ekonomi yang kuat dan kemungkinan memiliki infrastruktur yang lebih baik, akses ke layanan, dan peluang ekonomi. Sementara itu, wilayah dengan pendapatan pajak lebih rendah mungkin menghadapi tantangan dalam hal akses ke peluang ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Dari analisis deskriptif ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan termasuk perlunya intervensi pemerintah untuk meratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Hal ini dapat mencakup investasi di infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan kerja di wilayah dengan pendapatan pajak lebih rendah, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri dan jasa di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi distribusi pendapatan pajak di Jawa Tengah, yang dapat membantu dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih terfokus dan efektif.



Gambar 2. Sebaran Pendapatan Pajak Jawa Tengah

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Pengaruh Pengeluaran Perkapita (PPD)	Pendapatan Pajak (PP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Min	3.51	6163	4.25	1.76	64.75
Max	18	15764	16.41	9.64	79.57
Mean	11.32	10079.7	10.5817	5.34	71.124
Stdv	3.31	2333.97	3.22604	1.93	3.34
N	35	35	35	35	35

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa pendapatan pajak memiliki rata-rata 11,32%, dengan nilai terendah 3,51% dan tertinggi 18%. Rata-rata pengeluaran per kapita adalah 10.000 ribu rupiah, dengan rentang antara 6.163 ribu rupiah sebagai nilai terendah dan 15.764 ribu rupiah sebagai nilai tertinggi. Persentase rata-rata jumlah penduduk miskin adalah 10,58%, dengan nilai minimum 4,25% dan maksimum 16,41%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki rata-rata 5,34%, dengan nilai terendah 1,76% dan tertinggi 9,64%. Sementara itu, rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah 71,12%, dengan nilai minimum 64,75% dan maksimum 79,57%.

3.2. Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Normalitas

Tabel 2. Pengujian normalitas

	Unstandardized Residual
Test Statistic	0.089584
Asymp.Sig.(2-Tailed)	0.9178

Berdasarkan hasil uji Normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov didapatkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,9178. Artinya bahwa nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka distribusi data adalah normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

3.2.2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan, diperoleh nilai P-Value sebesar 0,7098. Artinya, nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa residu model memiliki varians yang konstan atau homogen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi dalam model regresi ini.

3.2.3. Uji Autokorelasi

Tabel 3. Pengujian autokorelasi residual

Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
2.1413	0.7098

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,7098. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel Durbin-Watson. Dalam konteks ini, karena nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai kritis bawah dan lebih kecil dari nilai kritis atas untuk tingkat signifikansi tertentu (umumnya 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya autokorelasi dalam residu model regresi pada tingkat signifikansi tersebut. Dengan demikian, asumsi tidak adanya autokorelasi dalam model regresi terpenuhi.

3.2.4. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Pengujian multikolinearitas

	Tolerance	VIF
X ₁	0.6130890	1.631085
X ₂	0.6092885	1.641259
X ₃	0.7602505	1.315356
X ₄	0.7569632	1.321068

Menggunakan besaran tolerance (a) dan variance inflation factor (VIF) jika menggunakan $\alpha/\text{tolerance} = 10\%$ atau 0,10 maka $VIF = 10$. Dari hasil output VIF hitung dari variable X₁ (1.631085), X₂ (1.641259), X₃ (1.315356), X₄ (1.321068) kurang dari $VIF = 10$, sedangkan X₂ (26,414). dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

3.3. Model Regresi Linier Berganda

Pada tahap awal membangun model regresi, untuk melihat variabel independen mana yang berhubungan dengan Pendapatan Pajak. Berikut hasil analisis korelasi *pearson*.

Tabel 5. Korelasi pearson variabel bebas terhadap variabel terikat

Variabel	Nilai	p-value
X ₁	-0.119925	0.4926
X ₂	0.1958	0.2594
X ₃	-0.1226458	0.4827
X ₄	-0.00750111	0.9659

Pada Tabel korelasi pearson ditampilkan empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Keempat variabel tersebut adalah X₁, X₂, X₃, dan X₄.

Tabel Uji signifikansi regresi linear secara parsial

	Estimasi	standar Error	t-value	p-value
Intercept	1.806e+01	1.553e+1	1.163	0.254
X ₁	6.335e-06	3.206e-04	0.020	0.984

	Estimati	standar Error	t-value	p-value
X2	2.153e-01	2.327e-01	0.925	0.362
X3	-3.076e-01	3.468e-01	-0.887	0.382
X4	-1.045e-01	1.959e-01	-0.533	0.598

Tabel Uji Signifikansi menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap pendapatan pajak. Signifikansi dari setiap variabel independen ditentukan dengan melihat nilai p-value dari uji t dan interval kepercayaan untuk estimasi parameter. Variabel dengan estimasi parameter yang mencakup nol dalam interval kepercayaannya dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi kontribusi individu dari setiap variabel terhadap model regresi.

$$\hat{Y} = 1.806e^{+01} + 6.335e^{-06} X1 + 2.153^{-01} X2 - 3.076e^{-01} X3 - 1.045e^{-01} X4$$

Nilai konstanta $\beta_0 = 1.806e^{+01}$ artinya jika variabel independent diasumsikan memiliki nilai koefisien nol (konstanta) maka pendapatan pajak sebesar $1.806e^{+01}$. Nilai koefisien regresi variabel Regresi Faktor atau variabel Bebas Baru (X1) $Bx1 = 6.335e^{-06} X1$. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif (searah), hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Regresi Faktor atau variabel Bebas Baru (X1) mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya variabel Pendapatan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar $6.335e^{-06}$.

Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. (X2) $Bx2 = 2.153^{-01} X2$ Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif (searah), hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Regresi Faktor atau variabel Bebas Baru (X2) mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya variabel Pendapatan Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 2.153^{-01} . Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. (X3) $Bx3 = -3.076e^{-01} X3$. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah), hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Regresi Faktor atau variabel Bebas Baru (X3) mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya variabel Pendapatan Pajak akan mengalami penurunan sebesar $3.076e^{-01}$.

Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. (X4) $Bx4 = -1.045e^{-01} X4$ Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah), hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Regresi Faktor atau variabel Bebas Baru (X4) mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya variabel Pendapatan Pajak akan mengalami penurunan sebesar $-1.045e^{-01} X4$. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh dari empat variabel independen terhadap pendapatan pajak di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua variabel memiliki pengaruh positif dan dua variabel memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan pajak. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tertentu memainkan peran penting dalam menentukan pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan kebijakan yang dapat meningkatkan variabel-variabel dengan pengaruh positif, seperti peningkatan investasi di sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel dengan pengaruh negatif, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan merumuskan strategi yang dapat meminimalisir dampak negatif tersebut terhadap pendapatan pajak. Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk studi lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pendapatan pajak. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan data, menggunakan metode analisis yang berbeda, atau mengkaji dampak kebijakan fiskal terkini. Selain itu,

penelitian selanjutnya juga dapat mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan yang telah diterapkan, untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika pendapatan pajak daerah.

5. Daftar Pustaka

- [1] M. Sulistyowati dan B. S. Rahayu, "Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>," vol. 24, no. 01, hal. 1–9, 2023.
- [2] P. Schwarz *et al.*, "No Title شیئی مواد غذایی," *Eur. J. Endocrinol.*, vol. 171, no. 6, hal. 727–735, 2014, [Daring]. Tersedia pada: <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- [3] B. P. Aji, I. K. Kirya, dan G. P. A. J. Sesila, "Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng," *Bisma J. Manaj.*, vol. 4, no. 2, hal. 95–104, 2018, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- [4] W. Pajak, O. Pribadi, Y. Melakukan, dan P. Bebas, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Pekanbaru," *1 Maret*, vol. 26 nomor 1, hal. 16–18, 2018.
- [5] I. P. A. Sudarmana dan G. M. Sudiartha, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah," *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, vol. 9, no. 4, hal. 1338, 2020, doi: 10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06.
- [6] E. N. Manurung dan F. Hutabarat, "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, vol. 4, no. 2, hal. 121–129, 2021, doi: 10.35326/jiam.v4i2.1718.
- [7] L. Padang dan M. Murtala, "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *J. Ekon. Indones.*, vol. 9, no. 1, hal. 9, 2020, doi: 10.29103/ekonomika.v9i1.3167.
- [8] D. Dieda Genesis Azzahra, W. Riqul Aini, dan D. Desmawan, "Analisis Dampak Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Menurut Kabupaten Dan Kota Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi Banten," *Profit J. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 1, no. 4, hal. 01–09, 2022, doi: 10.58192/profit.v1i4.174.
- [9] V. S. N. Mala, B. Suyadi, dan R. N. Sedyati, "Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015," *J. Pendidik. Ekon. J. Ilm. Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekon. dan Ilmu Sos.*, vol. 11, no. 1, hal. 130, 2017, doi: 10.19184/jpe.v11i1.5014.
- [10] T. N. Padilah dan R. I. Adam, "Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang," *FIBONACCI J. Pendidik. Mat. dan Mat.*, vol. 5, no. 2, hal. 117, 2019, doi: 10.24853/fbc.5.2.117-128.
- [11] N. Astriawati, "Penerapan analisis regresi linier berganda untuk menentukan pengaruh pelayanan pendidikan terhadap efektifitas belajar taruna di akademi maritim Yogyakarta," *Bahari Jogja*, vol. XIV, no. 23, hal. 22–37, 2016.